BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki banyak kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan dan kebutuhan tersebut tidaklah terbatas. Kebutuhan-kebutuhan tersebut juga berbagai macam bentuknya. Menurut Alam (2013:46) menjelaskan kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3 yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier juga dapat dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah dapat dipenuhi. Kebutuhan yang semakin kompleks dan banyak tersebut membuat masyarakat dituntut untuk tidak lepas dari uang dan memerlukan dana yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan yang banyak tersebut. Namun, tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena berbagai faktor salah satunya adalah kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.

Oleh karena keterbatasan kondisi keuangan tersebut, maka-masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di tambah dengan keadaan perekonomian negara yang belum stabil, masyarakat harus mengatur perekonomiannya dengan teliti dan hati-hati. Untuk mengatasi kesulitan tersebut terdapat berbagai cara untuk mendapatkan dana. Salah satunya adalah dengan mencari pinjaman. Dimana masyarakat dapat mendapatkan dana dengan

cepat tanpa menjual barang berharga. Saat ini sudah banyak lembaga yang menyediakan dana pinjaman salah satunya dapat melalui lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan bank dapat berupa bank baik bank konvensional maupun bank syariah sedangkan lembaga keuangan non bank salah satunya adalah pegadaian syariah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki berbagai produk pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan tanpa kita sadari pegadaian syariah ini merupakan salah satu solusi memberantas rentenir yang banyak di Indonesia. Dan pegadaian syariah juga cepat dalam prosesnya terutama bagi masyarakat yang ingin cepat mendapat dana pinjaman.

Menurut Amalia Lika (2018:1) menjelaskan bahwa gadai syariah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan PT Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah yang sekarang berubah nama menjadi pegadaian syariah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian syariah sebagai murtafin dan nasabahnya sebagai rahn diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Andri Soemitra (2009:391) menjelaskan bahwa dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yakni akad rahn dan akad ijarah. Akad

rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah yakni akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Dengan demikian akad rahn dalam pegadaian syariah ini dapat menarik uang sewa atas penyimpanan barang bergerak tersebut kepada nasabah yang sudah melakukan akad. Maka dari itu, gadai emas syariah merupakan penyerahan jaminan barang bergerak berharga berupa emas kepada pegadaian syariah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

Amalia Lika (2018:1) mengatakan bahwa Dalam akad rahn ini barang berharga tersebut tidak otomatis berpindah kepemilikan kepada pegadaian syariah sebagai piutangnya. Namun, barang berharga tersebut masih dalam kepemilikan rahin. Dengan kata lain rahn di tangan pemberi utang ini hanya sebagai jaminan utang dari orang yang berutang dan bertujuan agar si pemberi utang (murtahanin) lebih yakin dan percaya terhadap penerima utang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung orang yang menggadai. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Adapun dalam gadai (rahn) emas tersebut diperlukan kerangka akuntansi yang tepat dan cepat sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya terhadap laporan keuangan pegadaian syariah. Adapun perlakuan

akuntansi yang dibuat oleh pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional terdapat perbedaan. Yakni perlakuan akuntansi di pegadaian syariah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI.

Setiap akad transaksi memiliki peraturan masing-masing yang sesuai dengan prinsip syariah dalam melakukan muamalah. Namun, akad rahn belum memiliki peraturan secara khusus yang mengatur terkait pembiayaan gadai emas akan tetapi akad rahn tersebut memiliki akad pendamping yakni akad ijarah. Menurut Ambarwati Tri Setyo (2019:3) Pegadaian syariah memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Keuangan no 107 tentang Ijarah. Ambarwati Tri Setyo (2019:4) Akad ijarah tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya biaya sewa pemeliharaan dan perawatan yang berkaitan dengan barang yang digadaikan.

Menurut laman web IAI mengenai PSAK Syariah 107 tentang ijarah yang mengatur tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Yang dimaksud dengan ijarah ialah sewa-menyewa obyek ijarah tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

Berdasarkan berita Jakarta Kompas.com (2018) bahwasannya pegadaian paling banyak terima pengajuan gadai emas. Emas merupakan barang berharga

paling banyak yang digadaikan ke Pegadaian Persero. Jumlahnya paling banyak masuk pegadaian ketimbang barang berharga lainnya. Hal ini juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang menebus emas menjelang lebaran.

Alasan penulis memilih PT. Pegadaian Syariah sebagai objek penelitian adalah dikarenakan semakin tinggi minat masyarakat terhadap gadai emas. Maka dari itu, pegadaian syariah harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra pegadaian syariah dimata masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan gadai emas syariah. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi gadai syariah agar masyarakat semakin yakin bahwasannya produk gadai syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan untuk masyarakat yang belum menggunakan produk gadai syariah juga yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

B. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlakuan akuntansi transaksi gadai (Rahn) emas dengan akad ijarah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika?
- 2) Apakah perlakuan akuntansi atas transaksi gadai emas yang telah diterapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika telah sesuai dengan PSAK Syariah 107?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas dengan akad ijarah yang telah diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika.
 - b) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi gadai emas akad ijarah yang telah diterapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dengan PSAK Syariah 107.
2. Adapaun manfaat dari penulisan ini adalah
- a) Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perhitungan gadai emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian.
 - b) Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak manajemen PT. Pegadaian syariah Cabang Dewi Sartika terutama dalam penerapan akuntansi syariah serta dapat membantu dalam menentukan keputusan yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu hambatan dalam penyelesaian gadai emas.
 - c) Bagi akademik, dapat menjadi salah satu referensi atau masukan penelitian mengenai transaksi gadai emas di PT. Pegadaian Syariah di masa yang akan datang.